

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan bukan sekadar masalah kurang uang, melainkan akumulasi dari berbagai keterbatasan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, tingginya angka kemiskinan adalah gambaran nyata bahwa kesejahteraan masyarakat di negara tersebut masih rendah, dan membutuhkan perhatian serta solusi yang menyeluruh dari pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Menurut Teori Kemampuan (*Capability Approach*) oleh Amartya Sen: menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan atau kurangnya peluang untuk mencapai kemampuan tersebut, seperti kurangnya akses pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan. Dengan demikian, kemiskinan menjadi gambaran rendahnya kesejahteraan karena membatasi potensi seseorang untuk hidup secara bebas dan bermartabat.

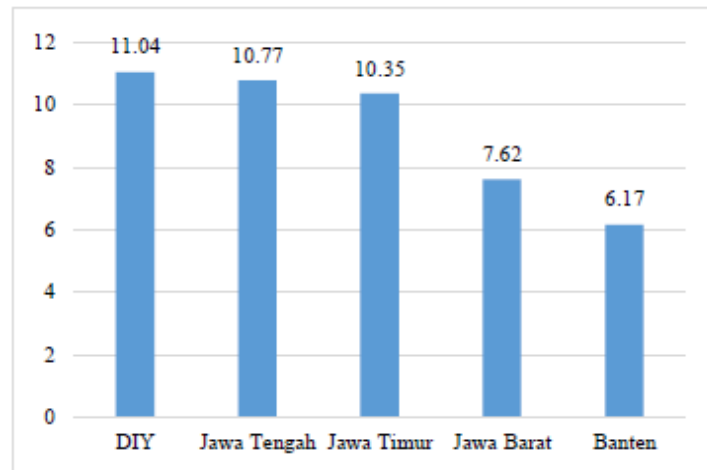
Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007: 4). Pada dasarnya Kemiskinan menjadi salah satu penghambat sulitnya suatu daerah atau negara untuk maju. Masalah kemiskinan menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, akibat ketidakmampuan mengakses pendidikan, kesehatan,

dan nutrisi yang baik. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas mereka yang ikut melemah (Triono & Sangaji, 2022).

Keterbatasan dalam kesejahteraan ini menyebabkan jumlah orang miskin semakin meningkat. Bagi negara Indonesia, kemiskinan dipandang sebagai suatu masalah yang sudah melekat sejak zaman dulu, penyelesaian dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini pun belum menunjukkan hasil signifikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana kehidupan individu berada dalam kekurangan pengeluaran per kapita setiap bulan dan tidak mampu memenuhi standar hidup minimum (Wibowo & Khoirudin, 2019).

Pemerintah Indonesia menetapkan target penanggulangan kemiskinan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta membedakan antara kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem. Target ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Jawa Barat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan visi Jawa Barat yang makmur, adil, dan sejahtera. Hingga akhir tahun 2025, capaian tingkat kemiskinan di Jawa Barat tercatat sebesar 6,78%, yang mendekati target yang ditetapkan, sementara target kemiskinan ekstrem terus dikejar hingga mencapai 0% pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menghapus kantong kemiskinan, serta didukung oleh berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Makan Bergizi Gratis, dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kemiskinan merupakan isu yang sangat kompleks dan juga mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menjadi provinsi paling miskin keempat di Jawa setelah Jawa Jawa Timur, Tengah dan juga DI Yogyakarta.



Sumber: Data diolah dari BPS, 2025

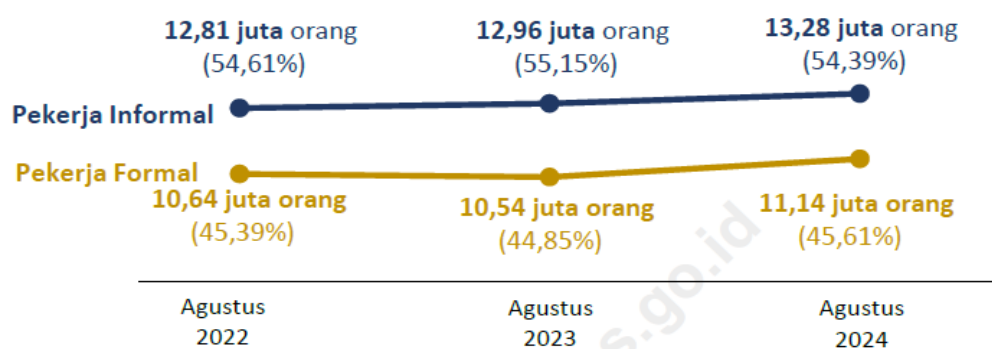
Gambar 1.1

Persentase 5 Provinsi Termiskin di Pulau Jawa Periode Maret 2023

Menurut gambar 1.1 di atas, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menjadi nomor 4 termiskin di Pulau Jawa, seharusnya Jawa Barat bisa menekan tingkat kemiskinan lebih rendah daripada Provinsi Banten karena Jawa Barat adalah kawasan industri dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, contohnya Kawasan Industri Jababeka (Cikarang, Kabupaten Bekasi) yang Fokus pada industri otomotif, elektronik, farmasi, dan manufaktur umum, dilengkapi fasilitas kota mandiri, sekolah internasional, hingga rumah sakit. Banten juga sama memiliki kawasan industri namun jumlah, kepadatan, dan penyebaran kawasan industri di Jawa Barat jauh lebih banyak dan luas, mencakup

berbagai jenis industri dari hulu ke hilir, sehingga menjadi pusat manufaktur utama di Indonesia. Tetapi karena banyak industri besar yang menggunakan modal luar dan tenaga kerja terampil dari luar daerah, sementara masyarakat lokal sering kali hanya bekerja di sektor pendukung atau informal dengan upah rendah dan tidak pasti. Selain itu, hasil nilai tambah industri sering kali tidak sepenuhnya tinggal di daerah karena rantai pasok dan pemasaran dilakukan di luar Jawa Barat. Selain itu, sektor industri tekstil yang menjadi penyerap tenaga kerja utama sempat terguncang akibat persaingan produk impor, yang menyebabkan PHK dan menambah beban pengangguran. Dan sekitar 8,57% ekonominya bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang bersifat tradisional dan belum terhubung dengan pasar luas. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri juga membuat sebagian petani kehilangan mata pencaharian tanpa alternatif yang jelas. Selain itu, sekitar 54,95% pekerja berada di sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial dan pendapatan tidak menentu. Strategi yang dilakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial, peningkatan pendapatan dengan mendukung UMKM, dan meminimalan kantong kemiskinan melalui kolaborasi antar pihak serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang diharapkan tenaga kerja bisa terserap dalam pasar kerja, memiliki pendapatan yang cukup, terlindungi hak-haknya dan dapat hidup sejahtera. Dalam rangka upaya menciptakan lapangan usaha yang berkualitas dan memadai serta meningkatkan kualitas penduduk bekerja, penting untuk mengetahui karakteristik penduduk bekerja yang ada, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Status pekerjaan utama penduduk juga dapat mengidentifikasi kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/ karyawan/pegawai, sedangkan status dalam pekerjaan utama lainnya termasuk ke dalam pekerja informal. Salah satu karakteristik penduduk bekerja yang menarik untuk dicermati adalah karakteristik penduduk pekerja menurut status kegiatan formal dan informal. Pada penelitian ini mengenai kondisi, karakteristik dan perkembangan pekerja informal di Jawa Barat. Sebanyak 24,42 juta penduduk Jawa Barat berstatus bekerja pada Agustus 2024. Status bekerja bukan merupakan jaminan kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Kualitas pekerjaan yang digeluti penduduk sangat memengaruhi kualitas kehidupannya. Salah satu yang menentukan rendahnya kualitas pekerjaan adalah rendahnya keterikatan pekerja terhadap pekerjaan tersebut, atau hubungan keduanya bersifat informal.



Sumber : Sakernas Agustus 2024

Gambar 1.2

**Jumlah dan Persentase Pekerja Formal dan Informal
di Provinsi Jawa Barat, Agustus 2022–Agustus 2024**

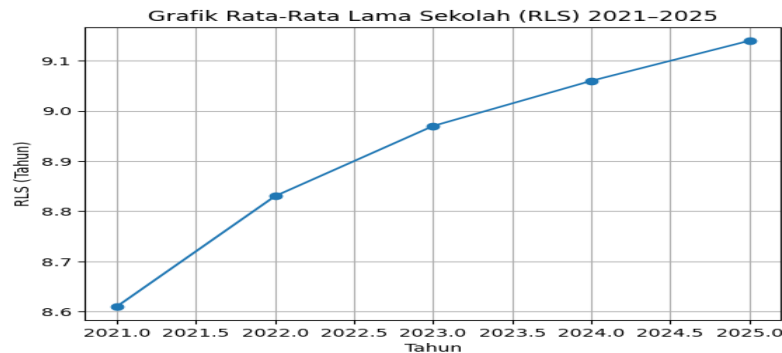
Dalam tiga tahun terakhir, proporsi pekerja informal lebih besar dari proporsi pekerja formal. Artinya, pada tiga tahun terakhir tenaga kerja di Jawa Barat lebih banyak yang terserap sebagai pekerja informal. Pada agustus 2022 pekerja informal mencapai 54,61% sekitar 12,81 juta orang, dan terus meningkat sampai agustus 2024 menjadi 54,39% dan jumlah orang mencapai 13,28 juta, meskipun secara persentase turun, struktur ketenagakerjaan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan di Jawa Barat, dimana dominasi dan peningkatan jumlah pekerja informal yang umumnya memiliki pendapatan tidak tetap serta kurangnya perlindungan sosial dapat berkontribusi pada tingginya jumlah penduduk miskin.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, salah satu faktor tersebut adalah kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan dan kemiskinan terutama dalam melanjutkan pendidikan, adalah tingginya angka putus sekolah pada masyarakat miskin dari jenjang sebelumnya ke jenjang yang lebih tinggi, terutama saat melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (rentang usia 16-18 tahun). Masalah tersebut muncul salah satunya karena terkendala akses baik fisik dan akses finansial seperti tingginya biaya sekolah, tingginya biaya transportasi dan alat penunjang sekolah, dan sebagainya.

Indikator dalam melihat baik atau buruknya tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara dapat dilihat melalui angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan lamanya

pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Cara berpikir seseorang pada saat menghadapi masalah sangat dipengaruhi oleh luasnya pengetahuan orang tersebut. Pangkal utama pengetahuan adalah melalui pendidikan. Dengan tingginya pendidikan maka makin banyak pilihan bagi manusia untuk hidup lebih sejahtera. Peran pendidikan dalam pengurangan ketimpangan dan kemiskinan dijelaskan dalam Teori *Human Capital* dari Schultz (1961), menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan dianggap sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas seorang individu, yang akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat yang meningkat, pertumbuhan ekonomi negara, dan pengurangan angka kemiskinan. Pendidikan dalam penelitian ini diwakili oleh angka rata-rata lama sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Barat terus meningkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun selama periode 2022 hingga 2025. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Jawa Barat yang lebih baik. Pada dimensi pengetahuan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat selama tahun 2022 hingga 2025 persentase rata-rata lama sekolah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah dari BPS, 2025

Gambar 1.3

Grafik Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat

Tahun 2022–2025

Berdasarkan gambar 1.3, menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan dari 8,61 tahun menjadi 8,83 tahun artinya rata rata masyarakat yang sekolah hingga kelas 2 SMP. pada tahun 2023 sampai 2025 meningkat pesat menjadi 9,14 tahun atau sampai kelas 3 SMP. Peningkatan rata-rata lama sekolah adalah langkah positif, namun tantangan kualitas dan pemerataan membuat dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum maksimal. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan bagi masyarakat Jawa Barat. Hal ini menunjukkan tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah di Jawa Barat, yang berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat.

Selanjutnya salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Masalah pengangguran semakin bertambah serius yang disebabkan oleh perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar (Sukirno S, 2019).

Selain itu faktor lain seperti industri yang mengalami bangkrut sehingga memberhentikan tenaga kerjanya juga ikut berperan dalam peningkatan jumlah penduduk miskin ini. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penyebab masalah pengangguran yaitu pertambahan tenaga kerja yang tidak dapat diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi yang baru. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam penduduk disebut angkatan kerja.

Dapat dikatakan angkatan kerja adalah seseorang yang berusia 15-64 tahun yang dalam bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi apabila orang dalam angkatan kerja tidak bekerja maka disebut pengangguran (Rahardja & Manurung, 2008). Dalam dunia kerja, terdapat istilah yang disebut dengan pengangguran terbuka (*open unemployment*), yaitu kondisi ketika seseorang individu sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, di kota-kota yang berkembang juga banyak ditemukan pengangguran terselubung (*underemployment*), yaitu suatu kondisi

ketika seseorang bekerja, tetapi jam kerjanya kurang dari standar normal atau pekerjaannya tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat pada Agustus 2024 sudah mengalami perbaikan di beberapa sektor dibandingkan kondisi Agustus 2022 maupun Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari 66,49 persen pada Agustus 2023 menjadi 67,71 persen pada Agustus 2024. Artinya, pada Agustus 2024, dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Jawa Barat, 67–68 orang diantaranya aktif di pasar kerja.

	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	66,15	66,49	67,71
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	8,31	7,44	6,75

Sumber: Sakernas Agustus 2022-2024

Gambar 1.4.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat (Persen), Agustus 2022 – Agustus 2024

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada Agustus 2024 juga berangsur mengalami penurunan, dari 7,44 persen pada Agustus 2023 menjadi 6,75 persen. Artinya, pada Agustus 2024, dari 100 orang penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja di Jawa Barat, sekitar 6–7 orang diantaranya belum terserap pasar tenaga kerja. Penurunan TPT tersebut terjadi akibat aktivitas ekonomi yang bergeliat yang berdampak pada terserapnya

angkatan kerja pada pasar kerja, terutama sektor-sektor informal. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu jumlah pengangguran di Jawa Barat, sehingga pola sebaran kemiskinan yang berbeda-beda.

Meskipun ketiga variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Pekerja Sektor Informal, Rata-rata Lama Sekolah dan Jumlah Pengangguran, menunjukkan tren positif yang beragam setiap tahunnya, dengan pola peningkatan dan penurunan yang terjadi secara dinamis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan dalam indikator-indikator tersebut, belum mampu membawa perubahan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini. Selain itu, tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih bersifat fluktuatif, mencerminkan adanya ketidakstabilan yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor lain yang memengaruhi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Pekerja Sektor Informal, Rata-Rata Lama Sekolah dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2006-2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2006-2025?
2. Bagaimana pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2006-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2006-2025
2. Untuk mengetahui pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2006-2025

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian teori tentang pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

3. Memperkaya literatur terkait pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran serta jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait untuk mengevaluasi tentang pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman, terutama yang berhubungan dengan pengaruh pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. lokasi ini dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki karakteristik keragaman kondisi sosial ekonomiyang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Seluruh data yang digunakan dalam analisis merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait lain yang relevan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6

Jadwal Penelitian

[illegible]